

Kepentingan India Melalui *Act East Policy* di Kawasan Asia Tenggara

Delvina Putri Ayu¹, Muhammad Yusra², Diah Anggraini Austin³

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Andalas, Padang, Indonesia

E-mail: ¹dlvnaptr@gmail.com, ²muhammadyusra@fisip.unand.ac.id,

³diahanggrainiaustin@soc.unand.ac.id

Abstract

The end of the Cold War put India in a state of crisis therefore in 1991 India issued the Look East Policy. This policy brought India to significant progress in their country. However, the dynamic of international politics led India to make a change in this policy in 2014 to Act East Policy. The difference from this policy lies in the reach of the region and the reach of the field of cooperation. Nevertheless, India has always designated the Southeast Asian region as an anchor in its policies. This study aims to describe and analyze India's interest in Act East Policy as its foreign policy in the Southeast Asian region using the conceptual framework of national interest by Donald E. Nuechterlein. This research divides India's national interests into four basic needs namely defense, economy, world order, and ideology interest. Data collection and analysis techniques are carried out with qualitative methods as well as analytical descriptive approaches. The research found that India's national interest in the Southeast Asian region through Act East Policy is to contain the rising China, build the economy in the Northeast region of India through Southeast Asia, maintain the stability of the global order, and proliferate India's ideology and values.

Keywords: *Act East Policy, Indian Foreign Policy, National Interest, North East Region India, Southeast Asia.*

Pendahuluan

Berakhirnya Perang Dingin membawa perubahan pada kondisi kontestasi politik internasional. Perubahan ini mempengaruhi negara terutama pada bagaimana negara membentuk kebijakan politik luar negerinya. Salah satu negara tersebut adalah India. Pada tahun 1991, Perdana Menteri Narasimha Rao mengeluarkan kebijakan luar negeri India yang disebut dengan *Look East Policy* (LEP). Selama 20 tahun berjalan, kebijakan ini membawa India menjadi negara *emerging power* yang kemudian di tahun 2014, India melakukan perubahan pada kebijakan luar negerinya dan memperbarui LEP menjadi *Act East Policy* (AEP). Perubahan dalam kebijakan ini adalah pada jangkauan wilayah dan jangkauan bidang kerja sama. Jika dalam LEP hanya berfokus pada kawasan Asia Tenggara dan kerja

sama di bidang ekonomi saja, maka dalam AEP menjangkau kawasan Asia Tenggara, Asia Timur, Kepulauan Pasifik hingga Australia dengan kerja sama di bidang ekonomi, politik, sosial-budaya, hingga keamanan.

Meskipun jangkauan AEP kini menjadi lebih luas, India menyatakan bahwa kawasan Asia Tenggara tetap menjadi prioritas dari implementasi AEP. Pernyataan ini diperkuat dengan pernyataan Perdana Menteri Narendra Modi saat kunjungannya ke Singapura di tahun 2015 yang menyatakan bahwa ASEAN sebagai “anchor of our Act East Policy.” Dari kedua kebijakan baik LEP dan AEP yang diterapkan pemerintah India, kesamaan dari kedua kebijakan ini adalah penekanan terhadap pentingnya negara-negara di kawasan Asia Tenggara seperti negara-negara yang tergabung dalam regionalisme ASEAN.

Perubahan kebijakan yang dilakukan India tidak semata-mata mengubah fokus utama LEP dan AEP yaitu di kawasan Asia Tenggara. India dalam beberapa kurun waktu sebelumnya selalu menggunakan LEP sebagai kebijakan luar negerinya. Kemudian, India menetapkan kembali kawasan Asia Tenggara menjadi fokus utama kebijakan berikutnya dalam AEP. Terlihat bahwa kawasan Asia Tenggara selalu menjadi pilihan prioritas India. Oleh karena itu, perubahan kebijakan ini menarik untuk diteliti dengan tujuan penelitian untuk menganalisis kepentingan India dalam *Act East Policy* sebagai kebijakan politik luar negerinya di kawasan Asia Tenggara di bawah pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi.

Metode

Penelitian ini menggunakan penelitian yang bersifat kualitatif dengan jenis penelitian yaitu deskriptif analitis yang digunakan untuk mengungkapkan kejadian serta memberikan deskripsi secara sistematis, factual, dan akurat. Penelitian ini juga memberikan batasan penelitian yaitu batasan isu yang hanya difokuskan pada pengaruh kebijakan luar negeri AEP di kawasan Asia Tenggara dan batasan waktu yaitu pada periode tahun 2014 hingga 2023. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah menggunakan data sekunder sebagai data utama penelitian dengan Teknik studi kepustakaan (*library research*).

Kemudian dalam teknik analisis data melalui tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Tinjauan Pustaka

Beberapa penelitian terdahulu seperti artikel jurnal yang ditulis oleh Thongkholal Haokip yang berjudul *India's Look East Policy: Its Evolution and Approach* (2014), buku yang ditulis oleh Amitav Acharya yang berjudul *India's 'Look East' Policy* (2015), dan artikel jurnal yang ditulis oleh Amitendu Palit yang berjudul *India's Act East Policy and Implications for Southeast Asia* (2016) memberikan peneliti gambaran dan deskripsi pada bagaimana kebijakan LEP terbentuk dan berjalan sejak lama hingga menuju kepada pembaharuan kebijakan tersebut menjadi AEP. Tidak banyak kajian literatur yang membahas kajian AEP dengan melihat pada implementasinya di kawasan Asia Tenggara setelah LEP digantikan dengan AEP sehingga peneliti merasa perlu untuk mengisi *research gap* yang ada.

Hasil dan Pembahasan

Politik Luar Negeri India

India merupakan negara yang terletak di kawasan Asia Selatan yang merdeka di tahun 1947 dan menjadi negara demokrasi terbesar setelah AS. Pasca Perang Dunia II, bipolaritas terjadi dalam politik internasional. Seperti beberapa negara baru yang merdeka pasca Perang Dunia II, India memutuskan untuk tidak ingin memihak pada blok militer manapun baik itu blok Barat AS maupun blok Timur USSR. Oleh sebab itu, India percaya pada kebijakan yang damai dan non-kekerasan baik itu dalam kebijakan luar maupun dalam negerinya.

Politik luar negeri India di awal kemerdekaan memang banyak terpengaruh oleh para pemangku kebijakan, pemimpin politik, dan filsuf seperti Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, dan Sarvapalli Radhakrishnan yang mengatur elit India dengan membawa elemen *altruism* dan *idealism* dalam kebijakannya. Politik luar negeri India yang didefinisikan oleh Nehru sebagai non-blok didasarkan pada the Five Principles of Panchsheel (Lima Prinsip Panchsheel) yaitu saling menghargai

kedaulatan dan integritas territorial negara, non-agresi (tidak menyerang), non-interferensi (tidak ikut campur) urusan dalam negeri, kesetaraan dan saling menguntungkan dan hidup berdampingan dengan damai.

Kemudian, India juga merumuskan Doktrin Gujral pada tahun 1996 sebagai Upaya untuk merevitalisasi hubungannya dengan negara tetangga di kawasan Asia Selatan. Doktrin Gujral ini juga merupakan bagian dari politik luar negeri India di masa LEP diberlakukan. Melalui pembaharuan dalam Doktrin Gujral, India kemudian muncul menjadi *new emerging power* di wilayah Asia terutama di kawasan Asia Selatan. Dari sini, terlihat bahwa politik luar negeri India memang selalu menjunjung tinggi perdamaian dan kerja sama.

Terbentuknya LEP di tahun 1990 kembali sekali lagi membuktikan bahwa India menjadi negara yang selalu menginginkan kerja sama dan fokus untuk membangun hubungan eksternalnya. Yang dimaksud dengan *look east* adalah *outward looking* India dalam mengumpulkan seluruh dukungan baik domestik maupun regional yang secara langsung memfokuskan dalam membangun sinergi dengan negara tetangga yang cepat, terkonsolidasi, dan progresif menuju arah Timur di pusat benua Asia. Pilar utama dari LEP adalah Commerce, Culture, and Connectivity (3Cs) atau yang juga dimaksud dengan perdagangan, budaya, dan konektivitas. Pilar ini juga digunakan oleh India guna mempererat hubungannya dengan ASEAN yang merupakan organisasi regional Asia Tenggara.

Di bawah pemerintahan Narendra Modi, kemunculan AEP di tahun 2014 menjadi pembaharu bagi kebijakan luar negeri India yang lebih menekankan pada kegigihan India untuk memainkan fokus pada hubungan dengan negara-negara tetangga Asia dan peran yang lebih proaktif dan ambisius ke “Timur.” Pada ASEAN-India Summit ini juga, Narendra Modi mengumumkan adanya peningkatan kebijakan India dari LEP ke AEP yang lebih berorientasi pada peran aksi. Pernyataan ini didukung oleh Perdana Menteri Luar Negeri India, Sushma Swaraj yang menggarisbawahi usaha India untuk berhubungan lebih erat dengan Asia Tenggara melalui AEP.

AEP lebih menekankan pada memperkuat hubungan strategis di kawasan Asia Tenggara. Memposisikan ASEAN sebagai inti dari AEP, India telah mengembangkan jangkauannya di kawasan tersebut dan meningkatkan level hubungan dari sekedar ‘Sectoral Dialogue’ menjadi ‘Strategic Partner.’ Pendekatan India terhadap kawasan melalui AEP terbagi menjadi tiga bagian yaitu:

1. Menghargai arti penting dari ASEAN sebagai pusat ekonomi regional AEP
2. Terlibat dengan CLMV sebagai prioritas strategis
3. Menghubungkan bagian dari negara-negara di Asia Tenggara dalam kerja sama bilateral

Kebijakan AEP merupakan sebuah refleksi ekonomi jangka panjang dan memanfaatkan posisi strategis untuk menciptakan hubungan yang lebih dekat dan berkualitas di kawasan ini. Selain itu, India juga menjalin kerja sama bilateral pakta pertahanan dengan hampir seluruh negara-negara di Asia Tenggara dengan memfasilitasi penjualan teknologi, pelatihan personnel, dan pelatihan joint military. Melalui kebijakan ini juga, Narendra Modi mengeluarkan enam poin prioritas India. Poin-poin yang dimaksud adalah keamanan siber, pembaharuan energi, ASEAN, hak kekayaan intelektual, dan terorisme. Selain keenam poin tersebut, prinsip ‘Solidaritas Asia’ juga menjadi prinsip utama dari India untuk mengimplementasikan AEP. Dari sini, dapat dilihat dimulai dari konsep non-blok, doktrin Gujral, LEP, hingga sampai kepada AEP, dapat dilihat pada konsistensi India dalam politik luar negerinya yang berbasis kepada perdamaian dan kerja sama.

Implementasi *Act East Policy* di Kawasan Asia Tenggara

Di antara negara-negara anggota ASEAN, koridor Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam (CLMV) merupakan salah satu subkawasan yang memiliki pertumbuhan wilayah yang paling pesat. Dengan pertumbuhan eksponensial dalam perdagangan dan investasi modal di beberapa tahun terakhir, tren subkawasan

ini muncul karena Asia Tenggara secara lebih luas muncul sebagai pasar yang menguntungkan bagi raksasa ekonomi kawasan.

Setidaknya ada tiga bentuk implementasi AEP di CLMV. Pertama, Project Development Fund (PDF) yang diluncurkan pada Agustus 2016 senilai US\$ 70.4 juta yang digunakan untuk mendanai program-program pendukung pembangunan India-CLMV. Kedua, India-Myanmar-Thailand Trilateral Highway (IMT Highway) atau Asian Trilateral Highway adalah salah satu proyek pembangunan untuk meningkatkan konektivitas kawasan antara India-Thailand melalui Myanmar. Rute dari IMT Highway ini dimulai dari Moreh (India) via Bagan (Myanmar) ke Mae Sot (Thailand). Ketiga, Kaladan Multi-Modal Transit Transport Project (KMMTTP) yang merupakan proyek rute alternatif untuk menghubungkan Northeastern Region (NER) India dengan daratan utama India melalui Myanmar. Rute yang dibangun dimulai dari Pelabuhan Kolkata (India) ke Pelabuhan Sittwe (Myanmar) via laut. Dari Sittwe kemudian terhubung ke Paletwa via sungai Kaladan dan dilanjutkan dari Paletwa menuju perbatasan India. Dari wilayah Paletwa jalur darat hingga ke Lawngtlai, Mizoram, India.

India juga melakukan implementasi AEP di Indonesia. Dekatnya jarak kedua negara ini menjadikan India dan Indonesia sebagai mitra strategis dalam memastikan keamanan di wilayah maritim antarkedua negara. Keamanan maritim (*maritime security*) adalah suatu kondisi lingkungan maritim yang bebas dari berbagai ancaman terhadap kedaulatan wilayah negaranya. Kerja sama antara India dan Indonesia dalam menjalankan keamanan maritim dapat dilakukan melalui kerja sama bersama kekuatan angkatan laut. Kerja sama ini disebut dengan kerja sama Coordinated Partrol (CORPAT). Kemudian, pada tanggal 12-13 Desember 2016, Perdana Menteri Narendra Modi dan Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan yang menghasilkan *Shared Vision of India -Indonesia Maritime Cooperation*. Implementasi AEP India di Indonesia memang lebih difokuskan kepada bidang pertahanan dan keamanan.

Hubungan India dengan Singapura juga membawa AEP dalam rangkaian kerja samanya. Dalam bidang ekonomi, India menjalin kerja sama dengan Singapura dalam pembangunan area. Lima Area Kerja sama atau Five Areas of Cooperation (5S) disetujui pada 2014 untuk fokus spesifik yaitu: (1) Peningkatan Perdagangan dan Investasi; (2) Mempercepat konektivitas; (3) *Smart City* dan peremajaan kota; (4) Pengembangan skill; dan (5) fokus negara.

India juga melakukan implementasi AEP di Malaysia. Pada November 2015, Perdana Menteri Narendra Modi berkunjung ke India dan meningkatkan status hubungan India-Malaysia menjadi *enhanced strategic partnership*. Malaysia menjadi *partner* dagang terbesar ke-13 bagi India dan India sendiri menjadi terbesar ke-10 secara global bagi Malaysia. Perdagangan bilateral telah mencapai US\$17 miliar pada tahun 2021-2022. Dikelilingi oleh *sea lines of communication* seperti Selat Malaka dan Laut China Selatan, Malaysia tentunya juga menjadi pilar utama dalam implementasi AEP dan penting untuk strategi konektivitas maritim India.

Melalui AEP, India telah membangun kerja sama yang terintegrasi antara India dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Sesuai dengan perluasan bidang kerja sama, India mulai menjangkau tidak hanya kerja sama di bidang ekonomi saja tetapi juga mulai melakukan kerja sama di bidang pertahanan dan keamanan melalui upaya menjaga pertahanan keamanan maritim. Selain itu, India juga mulai bekerja sama dalam menjaga ataupun mempertahankan penyebaran nilai-nilai budaya melalui kerja sama ini. Setelah hampir Sembilan tahun berjalan, AEP telah menjalankan implementasi kebijakannya di kawasan Asia Tenggara.

Kepentingan India dalam *Act East Policy* di Kawasan Asia Tenggara

Kebijakan luar negeri dapat dianalisis pembentukannya dan intensitas implementasi kepentingan nasional melalui kebijakan luar negeri yang terbentuk dengan tujuan untuk mencapai kepentingannya. Menurut Hans

Morgenthau, kepentingan nasional diartikan sebagai konsep *power* (kekuasaan). Konsep tersebut merupakan pertimbangan utama suatu negara dalam membentuk sebuah kepentingan nasional. Kepentingan nasional menjadi tujuan negara dalam melakukan kegiatan politik internasional dan *power* menjadi sarana bagi negara untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan kata lain, kepentingan nasional suatu negara dapat dilihat melalui politik luar negerinya.

Dalam menganalisis kepentingan yang hendak dicapai India melalui AEP di kawasan Asia Tenggara, peneliti menggunakan kerangka konseptual kepentingan nasional oleh Donald E. Nuechterlein dalam bukunya yang berjudul “National Interests and Foreign Policy: A Conceptual Framework for Analysis and Decision-Making” pada tahun 1976. Nuechterlein membagi kepentingan nasional ke dalam empat kebutuhan dasar, atau persyaratan, yang menjadi dasar dari sebuah kebijakan luar negeri yaitu *defence interest* (kepentingan pertahanan), *economic interest* (kepentingan ekonomi), *world order interest* (kepentingan tatanan global), dan *ideological interest* (kepentingan ideologi).

1. Kepentingan Pertahanan

Sebuah negara dilihat tidak hanya dari kekuatannya di bidang ekonomi tetapi juga dilihat pada kemampuannya untuk menjaga pertahanan dan keamanan negaranya. Kepentingan pertahanan adalah kepentingan nasional berupa upaya sebuah negara untuk melindungi dirinya dan warga negaranya dari semua jenis ancaman yang ditujukan kepadanya. Bentuk ancaman dalam konteks ini adalah berupa ancaman fisik (*physical violence*) yang diakibatkan oleh negara lain. Dalam hal lainnya, ancaman yang tidak berasal dari negara tetapi terdapat campur tangan negara lain di baliknya masih dapat dikategorikan sebagai sebuah ancaman. Ancaman-ancaman yang dianggap mengganggu sebuah negara tersebut memerlukan keputusan atau tindakan dari negara untuk menghilangkan ancaman tersebut. Maka dari itu, kemampuan sebuah negara dalam sistem pertahanan juga perlu diperhatikan.

Dalam hal pertahanan dan keamanan, kekuatan militer India berada di posisi keempat terkuat dari 140 negara dan India hanya berada di bawah AS, Rusia, dan Tiongkok. Dana yang dikeluarkan India untuk sistem pertahanan ini sebanyak US\$71 miliar (13.18 persen dari total dana negara) dengan jumlah personil tentara aktif sebanyak 1.4 juta. Kemampuan India ini tentu saja dilakukan untuk memperkuat posisinya di kawasan dan juga dalam sistem internasional.

Perhatian India dalam bidang pertahanan dan keamanan ini memang menjadi bukti pendukung bahwa AEP tidak hanya fokus di bidang ekonomi saja. Dengan kondisi dunia yang menghadapi ancaman terus menerus dari negara-negara tetangga, di mana tenaga nuklir menentukan otoritas, dengan organisasi penjaga perdamaian kesulitan dalam tugasnya, pertanyaan tentang seberapa aman negara sendiri dan seberapa kuat negara lain untuk dilawan bisa menjadi pertanyaan sebuah negara saat ini.

Kepentingan India dalam AEP di bidang pertahanan dan keamanan sendiri hadir dikarenakan kemunculan *the rising China* yang memberikan perhatian dan kehati-hatian banyak negara. Di wilayah Asia Selatan (wilayah utama India berada), Tiongkok banyak melakukan kerja sama dengan negara-negara tetangga India. Kerja sama seperti pembentukan koridor ekonomi Tiongkok-Pakistan yaitu China-Pakistan Economic Corridor (CPEC) dan kerja sama *Maritime Silk Road Initiatives* dengan Bangladesh dan Sri Lanka yang mana kerja sama ini dapat meningkatkan kekuatan Tiongkok di wilayah lautan India. Meskipun kerja sama ini berdasarkan pada pembangunan infrastruktur ekonomi, India khawatir akan kemungkinan Tiongkok membangun pangkalan militer di negara-negara ini. Hal ini seperti yang telah terjadi di Djibouti, Tiongkok membangun pangkalan militernya di kawasan ini sehingga menambah kuat pengaruh Tiongkok di kawasan Samudra Hindia.

Kekhawatiran terancamnya posisi India ini membuat India juga mulai fokus pada kemananan maritim atau *maritime security* dengan menjaga sistem pertahanan dan keamanan negaranya yang memiliki Samudra Hindia dan Teluk Bengal yang

mana keduanya menghubungkan India dengan negara-negara di Asia Tenggara. Upaya ini juga menjadi tindakan India untuk menahan *the rising China* di kawasan karena kawasan ini memiliki Sea Lines of Communications (SLOC) dan Sea Lines of Trade (SLOT) yang juga penting bagi seluruh negara.

Perdana Menteri Narendra Modi memperkenalkan visi India dalam keamanan maritim ini dalam “SAGAR” yang berarti samudra dalam Bahasa Hindi. SAGAR merupakan akronim dari *Security and Growth for All in the Region* yang diperkenalkan Modi di Mauritius pada tahun 2015. Tujuan India adalah untuk melihat kepercayaan dan transparansi, menghormati aturan dan norma maritim internasional oleh semua negara, peka terhadap kepentingan satu sama lain, penyelesaian masalah maritim secara damai, dan peningkatan kerja sama maritim.

Secara pertahanan dan keamanan, kepentingan India melalui AEP di kawasan Asia Tenggara adalah karena sistem internasional yang kini multipolar sehingga posisi dan pengaruh India mulai harus bersaing dengan negara-negara besar lainnya baik dalam sistem internasional dan regional. India yang berada di kawasan Samudra Hindia juga harus menjaga pertahanan dan keamanan maritimnya. Jalur perdagangan maritim Samudra Hindia ini menghubungkan benua Asia dan benua Eropa sehingga banyak sekali kepentingan nasional negara di sana. Selain itu, secara pertahanan dan keamanan darat, posisi India dengan negara-negara tetangganya tidak cukup erat dan pengaruh Tiongkok di kawasan cukup kuat. Hal ini membuat India berupaya untuk menjalin kerja sama keamanan dengan kawasan terdekat lainnya yaitu Asia Tenggara.

2. Kepentingan Ekonomi

Kepentingan ekonomi adalah kepentingan yang berupaya untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan negara dalam hubungan dengan negara-negara lain. Kapabilitas ekonomi sebuah negara kerap menjadi dasar utama sebuah negara untuk membentuk sebuah kebijakan dan mencapai kepentingan

nasionalnya. Semakin meningkat perekonomian sebuah negara, semakin maju dan kuat negara tersebut dalam sistem internasional.

Dalam AEP, India memiliki tujuan dalam ekonomi berupaya pemeliharaan hubungan yang telah terjalin dengan negara-negara di Asia Tenggara dan membangun konektivitas. Pencarian India untuk hubungan ekonomi yang baru dengan Asia Tenggara tidak lagi didorong oleh globalisasi tetapi India ingin memfasilitasi pengembangan wilayah Timur Laut India atau India's Northeast Region (NER) dengan meningkatkan konektivitasnya ke dunia luar. NER ini merupakan wilayah terpencil dan terisolir India yang perlu dikembangkan. Alih-alih mencoba mengisolasi wilayah Timur Laut dari pengaruh luar, seperti yang dilakukan India di masa lalu, New Delhi kini menyadari pentingnya membuka wilayah ini untuk hubungan komersial dengan wilayah Asia Tenggara.

NER merupakan wilayah yang berbatasan langsung secara darat dengan wilayah Asia Tenggara yaitu Myanmar. Kawasan Timur Laut India merupakan pintu gerbang ke Timur dan kini menjadi salah satu inisiatif utama yang dikembangkan India saat ini. NER memiliki potensi dalam sumber daya alam yang dapat India manfaatkan sebagai komoditas ekspor ke kawasan Asia Tenggara. Negara bagian Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Tripura, Assam, Manipur, dan Sikkim memiliki sumber daya seperti gas alam, *hydropower* (tenaga air), dan minyak. Kemudian, kondisi iklim yang mendukung juga membuat NER menjadi wilayah penghasil karet dan teh terbaik.

Potensi yang dimiliki oleh NER ingin dimanfaatkan oleh India agar mencapai konektivitas dan pemerataan pembangunan di India itu sendiri. Pelaksanaan proyek konektivitas Project Development Fund, India-Myanmar-Thailand Trilateral Highway, dan Kalidan Multi-Modal Transit Transport Project menjadi penopang untuk kepentingan nasional India dalam bidang ekonomi karena NER menjadi wilayah tertinggal namun memiliki potensi. Asia Tenggara yang sangat potensial untuk menjadi penghubung NER dengan dunia luar dimanfaatkan India melalui AEP.

3. Kepentingan Tatahan Global

Setiap negara memiliki kepentingan untuk ikut turut serta dalam tatahan global. *World order interest* adalah kepentingan nasional berupa pemeliharaan kondisi politik dan sistem ekonomi internasional yang dapat membuat negara merasa aman. Ketika stabilitas politik dan ekonomi internasional ini dapat terjaga, maka warga negara dan perdagangan yang terjadi juga dapat beroperasi dengan naman juga. Dengan demikian, kepentingan negara di sini dapat menyesuaikan dengan kepentingan dunia internasional.

Dalam mencapai *world order interest*, India menggunakan pembaharuan pada AEP dibandingkan LEP agar dapat relevan dalam dinamika politik internasional saat ini. Ada empat elemen penting yang dimiliki oleh AEP dalam menjaga stabilitas tatahan global, yaitu:

- a. Mengamankan kawasan Asia Tenggara dan Samudra Hindia;
- b. Meningkatkan integrasi ekonomi, diplomasi, dan militer dengan Asia Tenggara agar dapat mempertahankan kondisi tatahan global yang stabil melalui sentralitas ASEAN;
- c. Memperdalam *strategic partnership* dengan negara *balancing power* seperti AS, Jepang, Australia, Perancis, Rusia, dan lainnya;
- d. Mengatur hubungan dengan Tiongkok untuk mitigasi perbedaan sembari mencari cara agar dapat berhubungan ketika dimungkinkan.

Kontestasi geopolitik di kawasan Asia Tenggara kini meningkat dengan kehadiran *regional initiatives* seperti BRI yang dicetuskan oleh Tiongkok dan FOIP oleh Jepang yang kemudian diikuti oleh AS. Politik internasional yang dinamis membawa India perlu untuk tetap relevan dan dapat mempertahankan eksistensi dan pengaruhnya di kawasan Asia Tenggara. Perubahan LEP menjadi AEP sendiri juga merupakan cara India untuk menjaga kepentingan nasionalnya dalam *world order* agar sistem ekonomi dan pertahanan negaranya masih tetap terlindungi.

India dalam menjaga perdamaian dan stabilitas politik internasional juga berdasarkan *the Five S Principal* yang disampaikan Perdana Menteri Narendra Modi pada pidatonya di Shangri La Dialogue 2018 yaitu *सम्मान* (*respect*); *सम्वाद* (*dialogue*); *सहयोग* (*cooperation*), *शांति* (*peace*), and *समृद्धि* (*prosperity*). India akan selalu berinteraksi dengan dunia melalui damai dan menghargai melalui *dialogue* dan komitmen absolut di hukum internasional.

4. Kepentingan Ideologi

AEP memiliki prinsip 4C yaitu *commerce*, *culture*, *connectivity*, dan *capacity building*. Dalam prinsip ini, India memiliki sebuah ‘attractive power’ atau daya tarik spesial dalam politik internasional. Joseph N. Nye mendefinisikan setidaknya ada tiga ‘attractive power’ sebuah negara yaitu: budaya (karena ini berbeda di setiap negara), nilai politik (kepercayaan yang dianut), dan kebijakan luar negeri (memiliki otoritas dan legitimasi). Salah satu yang dapat dilihat adalah pada bagaimana India menyebarkan *ideological interest*-nya melalui kebudayaan dan nilai-nilai yang dianut India.

Dalam konsep kepentingan nasional, *ideological interest* adalah sebuah kepentingan nasional yang bertujuan untuk memberikan perlindungan atas nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Kemudian yang dimaksud dengan nilai-nilai ini adalah dapat berupa kepercayaan/agama, ideologi, norma, maupun nilai-nilai keluhuran yang dipercaya oleh masyarakat sebagai sebuah hal yang baik dan perlu dijaga serta disebarluaskan. Meskipun India memberikan prioritas kepentingan nasional negaranya dalam bidang ekonomi dan pertahanan, upaya untuk menyebarkan ide-ide dan nilai-nilai yang dianut oleh India baik secara agama maupun kebudayaan juga menjadi salah satu bentuk bagian dari pencapaian AEP di kawasan Asia Tenggara.

Memahami diplomasi budaya yang dilakukan India di kawasan Asia Tenggara saat ini adalah pada relevansi India dalam memahami filosofi “Vasudhaiva Kutumbakam” atau वसुधैव कुटुम्बकम् yang berarti seluruh isi dunia adalah satu

keluarga. *Vasudhaiva Kutumbakam* terdiri dari tiga kata Bahasa Sansekerta yaitu *vasudhaa* (dunia), *iva* (seperti), dan *kutumbakm* (luas/keluarga). Kalimat ini pertama kali muncul dalam teks Hindu Bagian 6 dari Maha Upanishad VI yang kemudian menjadi referensi di *Hitopadesha* dan karya sastra India lainnya. Filosofi ini menjadi pondasi atas 5000 tahun peradaban India selama ini.

Melalui filosofi ini, India menunjukkan penyisipan budaya, nilai, serta keinginan untuk bertindak sentris dalam geopolitik kontemporer dan non-barat ke dalam agenda global yang lebih besar. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan filosofi ini secara luas oleh para pemimpin India yang ideal dan liberal dalam konsep norma global, globalisasi, dan *global commons*. Perdana Menteri Narendra Modi juga memberikan pernyataan ini dalam Eastern Economic Forum 2022 di Vladivostok, Rusia yaitu “*India's ancient doctrine "Vasudhaiva Kutumbakam" has taught us to see the world as a family. In today's globalized world, events in one part of the world create an impact on the whole world.*” Filosofi ini juga kembali disebutkan dalam kerangka G20 yang mana India kini memegang kepresidenan di tahun ini. *Vasudhaiva Kutumbakam* telah berevolusi menjadi konsep dari ‘*one earth, one family, one future.*’ Pembangunan yang inklusif membutuhkan fokus pada tantangan global bersama seperti kemiskinan, inequality, perubahan iklim, dan akses untuk edukasi dan pelayanan kesehatan.

Melaui AEP, India memiliki kepentingan untuk menyebarkan kepercayaan, nilai-nilai, dan kebudayaan yang dimilikinya. Hal ini sesuai pada prinsip 4C AEP. Kepentingan ini memang tidak menjadi fokus utama dalam AEP tetapi kepercayaan yang India miliki ini juga berdasarkan pada prinsip dasar dari kebijakan politik luar negeri India yaitu non-blok, antikolonialis, mengusung kerja sama, menguatkan hubungan dengan negara-negara di Asia melalui diplomasi dan *dialogue (persuasive approach)*. Hubungan India dengan negara-negara Asia Tenggara yang telah terjalin sejak lama melalui agama dan kebudayaan memungkinkan India untuk tetap mengusung kepentingan ini di kawasan Asia Tenggara di masa kontemporer. Upaya lebih dilakukan India dalam

filosofi Vasudhaiva Kutumbakam. Seluruh upaya ini memberikan pengaruh juga menjadi sebuah cara untuk mendapatkan kepentingan nasional bagi negara.

Kesimpulan

Melalui AEP, India hendak mencapai kepentingan pertahanan dan keamanannya yaitu menahan *the rising China* di kawasan agar stabilitas kawasan dapat terjaga. Sedangkan dalam kepentingan ekonomi, India sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia ingin membangun perekonomian yang merata untuk negaranya. NER menjadi wilayah tertinggal secara ekonomi sehingga India ingin membangun NER dengan menghubungkannya melalui Myanmar dan kemudian ke Asia Tenggara.

Dalam menjaga stabilitas tatanan global, India memilih untuk tidak bergabung dalam *regional initiatives* manapun. Kepercayaan India pada *non-alignment* juga membuat India tidak ingin terlihat sebagai bagian dari aliansi manapun. India melihat bahwa apabila tindakan India terlihat condong ke suatu aliansi ditakutkan India juga dianggap menjadi ancaman bagi negara-negara di Asia Tenggara. Dengan fokus pada mengejar kepentingan pertahanan dan ekonomi, India dapat mencapai kepentingan tatanan global pada akhirnya. Kepentingan India di kawasan Asia Tenggara yang terakhir adalah untuk menyebarkan ideologi ataupun kebudayaan yang dimilikinya. Tetapi, kepentingan ini bukanlah menjadi kepentingan utama yang hendak dicapai India. Kepentingan ini muncul dikarenakan *historical* dan *cultural linkages* yang dimiliki India dengan Asia Tenggara di masa lalu serta adanya diaspora India di kawasan ini.

Daftar Pustaka

- Chakraborty, Sreshtha. "Enduring 30 years of Cultural Relations between India and ASEAN." *The Diplomatist*. Last modified 2022. Diakses Juli 11, 2023. <https://diplomatist.com/2022/12/22/enduring-30-years-of-cultural-relations-between-india-and-asean/>.
- Fadilah, Luluk, dan Anggy Wira Pambudi. "Dampak Implementasi Kebijakan Look East dan Act East India terhadap Hubungan India dan ASEAN." *Jurnal Polinter* 6, no. 1 (2020): 46–59.

<http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/polhi/article/view/4143>.

Jaishankar, Dhruva. *Acting East: India in the Indo-Pacific. Brookings Impact Series*. Impact Series. New Delhi, 2019. <https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2019/10/Acting-East-India-in-the-INDO-PACIFIC-without-cutmark.pdf>.

Ministry of External Affairs Government of India. "Media Statements by Prime Minister of India and Prime Minister Vietnam in New Delhi." Last modified 2014. Diakses Juni 20, 2023. https://www.mea.gov.in/SpeechesStatements.htm?dtl/24143/Media_Statements_by_Prime_Minister_of_India_and_Prime_Minister_of_Vietnam_in_New_Delhi_October_28_2014.

Morgenthau, Hans J. "Great Debate': The National Interest of the United States." *The American Political Science Review* 46, no. 4 (1952): 961–988. <https://www.jstor.org/stable/1952108?origin=JSTOR-pdf>.

Palit, Amitendu. "India's Act East Policy and Implications for Southeast Asia." *Southeast Asian Affairs* (2016): 81–92. <http://www.jstor.com/stable/26466920>.

"English Translation of Address by Prime Minister, Shri Narendra Modi at the plenary session of the Eastern Economic Forum 2022." *Press Information Bureau Government of India*. Last modified 2022. Diakses Juli 13, 2023. <https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1857404>.

"Prime Minister's Keynote Address at Shangri La Dialogue (June 01, 2018)." *Ministry of External Affairs Government of India*. Last modified 2018. Diakses Juli 8, 2023. <https://www.mea.gov.in/Speeches-Statements.htm?dtl/29943/Prime+Ministers+Keynote+Address+at+Shangri+La+Dialogue+June+01+2018>.

"The National Centre for Good Governance (NCGG) completed the 2-week capacity building programme for 95 civil servants of Maldives & Bangladesh." *Press Information Bureau Government of India*. Last modified 2023. Diakses Juli 2, 2023. [https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1925804#:~:text=He shared the philosophy of,access to education and healthcare](https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1925804#:~:text=He%20shared%20the%20philosophy%20of,access%20to%20education%20and%20healthcare).